

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Oleh: Dhany Triadi, S.Hut*

Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia merupakan salah satu tugas dari Kementerian Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Saat ini kawasan konservasi di seluruh Indonesia mencapai 500an kawasan yang terdiri dari kawasan konservasi darat dan kawasan konservasi laut. Tiap-tiap kawasan konservasi mempunyai penanggung jawab dalam pengelolaannya baik itu Balai Taman Nasional, Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Propinsi. Pengelolaan kawasan konservasi selama ini telah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, namun demikian perlu dilakukan pengukuran efektivitas pengelolaan untuk dapat mengetahui apakah pengelolaan yang dilakukan selama ini sudah efektif atau belum. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga dihasilkan pengelolaan kawasan yang efektif dan efisien.

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi diartikan sebagai suatu kajian untuk mengetahui sebaik apa kawasan konservasi dikelola, terutama yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya dan pencapaian tujuan pengelolaan. Pengertian efektivitas pengelolaan menurut Hockings dkk (2003) dalam Hermawan (2010) mencakup tiga topik, yaitu permasalahan rancangan kawasan konservasi, permasalahan kelayakan sistem dan proses pengelolaan, serta layanan dari konservasi. Rancangan kawasan konservasi mencakup ukuran dan bentuk kawasan, pengelolaan zona penyangga dan koridor kawasan, keterwakilan ekologis, serta kelayakan kawasan dalam menjalankan fungsinya. Adapun kelayakan sistem dan sistem proses pengelolaan mencakup bagaimana pengelolaan dijalankan dan merespon tantangan yang ada, baik dari aspek perencanaan, pelatihan dan pengembangan kapasitas, hubungan masyarakat maupun implementasi pengelolaan. Sedangkan layanan dari kawasan konservasi merupakan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan baik untuk aspek biologis maupun sosial.

Pada tahun 2006, *World Commission on Protected Areas* (WCPA) telah mengembangkan kerangka kerja evaluasi efektivitas pengelolaan untuk kawasan konservasi. Kerangka kerja ini dibangun berdasarkan prinsip bahwa kawasan

konservasi yang baik harus mengikuti sebuah siklus proses yang mencakup enam unsur yang sangat penting dalam membangun pemahaman tentang seberapa efektif sebuah kawasan konservasi dikelola seperti pada Gambar 1 (Hockings dkk, 2006).



Gambar 1. Enam unsur kunci proses pengelolaan kawasan konservasi (Hockings, 2006)

Hockings dkk (2006) mengilustrasikan pengelolaan kawasan konservasi dalam sebuah siklus dengan mengidentifikasi enam unsur kunci dalam proses pengelolaan. Kajian terhadap enam unsur kunci tersebut harus dilakukan agar dapat dipahami efektifitas dari pengelolaan yang telah dilakukan. Unsur-unsur kunci (gambar 1) tersebut adalah:

- Diawali dengan pemahaman terhadap konteks dari kawasan konservasi yang mencakup arti pentingnya, ancaman yang dihadapi serta peluang yang ada, serta kondisi lingkungan sekitarnya
- Arahan perkembangan yang tercermin dalam perencanaan, yang mencakup visi, maksud dan tujuan, serta strategi untuk mengkonservasikan nilai-nilai dan mengurangi ancaman
- Alokasi sumberdaya dari petugas, dukungan finansial, serta sarana prasarana untuk meraih tujuan
- Penerapan aksi pengelolaan untuk meraih perkembangan yang diharapkan

- e. Keluaran hasil, baik barang dan jasa yang telah digambarkan dalam rencana pengelolaan
- f. Dampak atau outcome, yang terkait dengan pencapaian maksud dan tujuan. Outcome merefleksikan tujuan jangka panjang, seperti populasi flora dan fauna yang stabil, sistem ekologis yang berjalan baik dan sebagainya

Penerapan kerangka kerja ini membutuhkan empat tahapan proses, yaitu :

- a. Penetapan tujuan evaluasi
- b. Pemilihan metodologi dan merencanakan proses evaluasi
- c. Implementasi evaluasi
- d. Analisis, komunikasi serta penerapan hasil

Menurut Hartono (2008) kinerja pengelolaan kawasan konservasi merupakan resultan dari potensi kawasan, arahan dan kebijakan, fasilitasi dan supervisi, mobilisasi sumberdaya yang ada, kepemimpinan unit pengelola, sampai dengan faktor eksternal yang berada di luar kontrol pengelola kawasan. Menilai kinerja pengelolaan harus utuh dan menyeluruh mulai dari status potensi, perencanaan, sumberdaya, proses, output, sampai dengan outcomenya. Kriteria yang dipilih untuk setiap komponen merupakan *features* kunci dari komponen dimaksud. Indikator penilaian bisa *debatable*, tetapi untuk penyederhanaan bisa disusun suatu indikator yang dapat menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, misalnya mulai dari: sedang dipikirkan, sudah direncanakan, sedang dilaksanakan, sampai dengan hasil yang telah dicapai. Penilaian kinerja pengelolaan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana progress pengelolaan kawasan konservasi sudah dilakukan dibandingkan dengan tujuan jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi. Beberapa metode dalam melakukan penilaian efektivitas kawasan konservasi yang sering digunakan tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Beberapa metodologi yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja (efektivitas) pengelolaan kawasan konservasi

METODOLOGI	ORGANISASI PENGGUNA/ PENGEMBANG	PENGUNAAN
RAPPAM (<i>Rapid Assesment and Prioritization of Protected Areas Management</i>)	WWF	• Prioritasi dan pengalokasian sumber daya • Public support • Penilaian efektivitas
METT (<i>Management</i>	WWF & World	<i>Adaptive management</i>

<i>Effectiveness Tracking Tool)</i>	<i>Bank</i>	
MES Finland (<i>Management Effectiveness Study of Finland</i>)	<i>Finland</i>	<i>Adaptive management</i>
KRITIN KAKO (Kriteria dan indikator Pengelolaan Kawasan Konservasi)	Ditjen PHKA, Kemenhut	• Prioritasi dan pengalokasian sumber daya • <i>Adaptive management</i>

Sumber: Hartono, 2008

Balai Besar KSDA Jawa Timur yang mengelola kawasan konservasi sebanyak 23 kawasan yang terdiri dari cagar alam (18), suaka margasatwa (2) dan taman wisata alam (3) perlu melakukan penilaian efektifitas pengelolaan kawasan. Hal tersebut untuk mengetahui seberapa efektifkah pengelolaan yang telah dilakukan selama ini. Jika sudah diketahui efektifitasnya maka akan memudahkan pengelola untuk melakukan tindakan perbaikan sehingga dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu diperlukan suatu komitmen dari Balai Besar KSDA untuk dapat memprioritaskan pengelolaan kawasan dalam perencanaan yang dibuat dan juga dalam kegiatannya yang disesuaikan dengan hasil dari penilaian efektivitas kawasan masing-masing.

Perencanaan pengelolaan kawasan (rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek) yang sudah ada harus diimplementasikan di lapangan sehingga dokumen perencanaan tersebut bisa dimanfaatkan dan dijadikan pedoman dalam mengelola kawasan konservasi. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada kawasan konservasi bersifat sporadis dan karena adanya kemauan pengelola. Selain itu juga perlu adanya kepastian anggaran dan dukungan sumberdaya dari pengelola (Balai Besar KSDA Jawa Timur) dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sumber:

Hartono, 2008. *Mencari Bentuk Pengelolaan Taman Nasional Model: Sebuah Tinjauan Reflektif Praktek Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia*. Makalah dalam workshop Sistem Pengelolaan Kawasan Konservasi. Banyuwangi

- Hockings, M., Stolton, S., Leverington, F., Dudley, N. and Courrau, J. 2006. *Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas 2nd Edition*. WCPA Best Practice Protected Areas Guidelines. Gland: IUCN
- Hermawan, M.T.T. 2010. *Kajian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Merapi : Aplikasi RAPPAM, METT dan IDF untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Taman Nasional*. Program hibah kompetisi institusi UGM. Yogyakarta: Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan